
Hasil Penelitian

Kegagalan Calon *Incumbency* Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010

Abstract

This research backgrounded by prospective drubbing politics phenomenon incumbency carry the wind region at Regency Indragiri Hulu. Remembering politics force and candidate dominate incumbency one that huge deep win General Election competition carries the wind Region at Indonesian. Politics actor that carries self as prospective as incumbency on Elect carries the wind Region at Regency Indragiri Hulu's year 2010 experiences failing (defeat blackballs). To the effect this research main is subject to be know prospective bust causation factors incumbency on Elect performing carries the wind Region and Region head Representative at Regency Indragiri Hulu year 2010. Reputed theory relevant with about problem this is cognitive about power purpose and Winning Strategy theory. Where is prospective failing incumbency this was analysed from that candidate trick keeps power (status quo) by use of its politics resource as prospective as region head that officiating and also analyses on prospective effort incumbency and its success team at deep do Winning Strategy (Political Marketing).

This Observational type is observational descriptive qualitative, by use of interview data collecting tech which is a straightforward communication with observational informan and does Question-answer that is engaged research problem, then observation to word, give, and identifies happening phenomena, and does analisis about data which is engaged Pilkada's management and performing at Regency Indragiri Hulu Year 2010. After been done its observational, gotten by observational result, that prospective bust factor incumbency caused,First, candidate incumbency insufficiently optimal deep utilize its politics resource as official as be of power, as frail its Mass Media Mastery, its frail is ability does loby politics to strong party at region (Local Politics Mastery),and optimalization reducing program exploit, budget and government facility for mengkapitalisasi elector society support. Both of, Winning strategy (Political Marketing) candidate incumbency also under investment strength, as pattern positioning that don't effective, amongst those on segmentation and targeting what do just gain control governance center region and politics force basis traditional it just and not dominates at other region basises that become voice granary outgrow at Indragiri Hulu's Regency, policy one that reducing implementable base prospective performance incumbency all this time. Candidate (person) candidate incumbency one that reducing gets place again at society heart, try a fall supporting political party (party) one that have no term basis outgrows at Indragiri Hulu's Regency, and push marketing that responsif's reducing and not conspicuous of elector.

Keywords: Incumbency, General Electoral, Political Marketing

*** Hasanuddin, Amir Syamsuadi**

** Adalah Dosen dan Alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana demokrasi yang sangat penting untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu dipercaya

sebagai lembaga dan proses demokrasi yang berfungsi mewujudkan kedaulatan rakyat. Dengan adanya Pemilu warga negara diberi kekuasaan untuk menentukan orang-orang yang akan mengisi jabatan didalam

Hasil Penelitian

pemerintahan. Memilih dan menentukan kepala pemerintahan di wilayah provinsi, kabupaten atau kota disebut dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada merupakan bentuk rekrutmen kepemimpinan di tingkat lokal dan merupakan implementasi dari kehidupan berdemokrasi di level daerah. Menurut Alwis pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis adalah karena prinsip demokrasi. Setiap pejabat publik yang merupakan pemegang jabatan politis harus dipilih secara langsung sebagai mekanisme akuntabilitas jabatan politis dan kontrak politik antara rakyat dengan pemimpinnya, sehingga upaya untuk menciptakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dapat direalisasikan.¹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dan partai politik, disebutkan bahwa Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.²

Mulai bulan Juni tahun 2005, Indonesia untuk pertama kali telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ketentuan mengenai Pilkada langsung ini didasarkan pada UU No. 32 tahun 2004. Satu kemajuan yang berarti bagi sejarah bangsa Indonesia, dimana telah ada perubahan paradigma pemilihan kepala daerah dari pemilihan kepala daerah dengan sistem perwakilan melalui DPRD, berubah menjadi pemilihan kepala daerah dengan sistem pemilihan langsung. Beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 3 juni

2010, Kabupaten Indragiri Hulu menyelenggarakan Pilkada secara langsung untuk memilih bupati dan wakil bupati yang diharapkan mampu membawa Kabupaten Indragiri Hulu menjadi kabupaten yang lebih baik. Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan pemilihan langsung bupati dan wakil bupati yang akan memimpin kabupaten tersebut sampai lima tahun mendatang. Hal ini merupakan momentum besar bagi warga Kabupaten Indragiri Hulu, karena Pilkada langsung tahun 2010 ini merupakan saat dimana untuk kedua kalinya masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu menentukan sendiri pemimpinnya. Keberhasilan dan kegagalan kandidat calon kepala daerah dalam Pilkada ini, akan menjadi catatan sejarah penentuan calon pemimpin di Kabupaten Indragiri Hulu kedepannya.

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2010 serentak dengan pelaksanaan Pilkada di 3 (tiga) Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti dan Kota Madya Dumai. Kandidat calon kepala daerah di Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu ini diantaranya adalah pasangan: Drs. H. Tengku Razmara, M.Si dengan Dra. Hj. Herawati, MM, pasangan Ir. H. Amed Tribjapraja, MM dengan Zulfahmi Adrian, AP, M.Si, pasangan Yopi Arianto, SE dengan Harman Harmaini, SH, MH, dan pasangan Drs. H. Mujtahid Thalib dengan Drs. H. R. Marjohan Yusuf. Para kandidat tersebut resmi menjadi calon kepala daerah setelah diumumkan penetapannya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 1 April 2010 di gedung Dang Purnama

¹ Alwis, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Sebagai Upaya Demokrasi* di daerah, Pekanbaru 2005, hal: 2.

² Sisrianto, *Studi Kemenangan Karmila Dharma Santi Sebagai Anggota Legislatif Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kota Pekanbaru*, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip UR 2010

Hasil Penelitian

Rengat.³ Setelah penghitungan suara selesai dilakukan, calon *incumbency* Mutjahid Thalib bersama pasangannya Marjohan Yusuf secara tidak terduga, mengalami kegagalan dan kalah dalam pemilihan. Perolehan suara pasangan calon *incumbency* tidak memenuhi kuota untuk memenangkan pasangan tersebut di Pilkada. Calon *incumbency* hanya unggul di 3 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Inhu. Pasangan Mutjahid Thalib dan Marjohan Yusuf (MM) hanya unggul di Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Sei Lala dan Kecamatan Rengat Barat. Sementara itu, calon *non incumbency* Yopi Arianto bersama pasangannya Harman Harmaini mendominasi sebagian besar peolehan suara di wilayah pemilihan. Pasangan Yopi-Harman (Ya-Rahman) unggul di 10 kecamatan, dari 14 kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Indragiri Hulu. Mereka unggul di Kecamatan Rengat, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Peranap, Kecamatan Lirik, Kecamatan Kuala Cenaku, Kecamatan Batang Peranap, Kecamatan Rakit Kulim dan Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Sisa keunggulan 1 suara di kecamatan, diperoleh pasangan Tengku Razmara-Herawati (Tuah), yaitu di Kecamatan Kelayang. Sementara itu pasangan lainnya, Amedtripjapraja dengan Zulfahmi Adrian (Adzan), sama sekali memiliki keunggulan suara di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Indargiri Hulu.

Hasil perhitungan suara Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan yang ditetapkan oleh KPUD Inhu pada tanggal 8 juni tahun 2010. Suara sah untuk pasangan nomor urut 1: Drs.H.Tengku Razmara,MSi dan

Dra.Hj.Herawati, MM Perolehan suara sah (28.392) Presentase (18,26), suara sah untuk pasangan nomor urut 2: Ir.H.Amed Tribjapraja, MM dan Zulfahmi Adrian, AP, M.Si Perolehan suara sah (29.183) Presentase (19,80), suara sah untuk pasangan nomor urut 3: Yopie Arianto,SE dan Harman Harmaini, SH, MH, perolehan suara sah (53.791) Presentase (36,50), dan suara sah untuk pasangan nomor urut 4: Drs.H. Mujtahid Thalib dan Drs. H.R. Marjohan Yusuf, perolehan suara sah (36.014) Presentase (24,44). Jumlah perolehan seluruhnya adalah (147.380). Hasil rekapitulasi suara sah oleh KPUD Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I
Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Sah Pada Pilkada Inhu Tahun 2010

No	Nomor Urut Pasangan	Perolehan Suara Sah	Jumlah (%)
1	I	28.392	19,26
2	II	29.183	19,80
3	III	53.791	36,50
4	IV	36.014	24,44
Jumlah Suara Seluruhnya		147.380	100,00

Sumber : KPUD Kab. Indragiri Hulu, 2010

Keterangan :

Pasangan I: Drs.H.Tengku Razmara, M.Si dan Dra.Hj.Herawati,MM

Pasangan II: Ir.H.Amed Tribjapraja, MM dan ZulfahmiAdrian,AP,M.Si

Pasangan III: Yopi Arianto,SE dan Harman Harmaini,SH,MH

Pasangan IV: Drs.H. Mujtahid Thalib dan Drs.H.R. Marjohan Yusuf

Rekapitulasi suara pada Pilkada tersebut secara sah, memposisikan pasangan Mutjahid Thalib dan Marjohan Yusuf sebagai calon yang kalah dalam pemilihan. Pasangan tersebut hanya berada di urutan kedua dengan perolehan suara 36.014 (24,44%) kalah dari pasangan Yopi Arianto dan Harman Harmaini yang unggul dengan perolehan suara

3

http://www.riaumandiri.net/rm/index.php?option=com_content&view=article&id=2634:4-pasangan-lolos-ikuti-pilkada-inhu7catid=45:pilkada-2010danitemind=1.

Hasil Penelitian

sebanyak 53.791 (36,50%). Dengan terpilihnya Yopi Arianto dan Harman Harmaini sebagai pemenang Pilkada, secara otomatis memupuskan calon *incumbency* untuk kembali mempertahankan kekuasaannya sebagai kepala daerah, dan harus merelakan jabatannya tersebut kepada pemenang Pilkada. Berbagai sumber daya yang dimiliki oleh calon *incumbency* tidak dapat menjamin kandidat tersebut untuk dapat kembali memenangkan Pilkada. Lalu, bagaimana strategi membangun kekuatan politik yang diterapkan calon *incumbency* selama ini didalam mempersiapkan Pilkada di Kabupaten Inhu tahun 2010.? Begitu pentingnya membangun kekuatan politik untuk kepentingan kemenangan Pilkada. Jika tidak di perhatikan taktik lawan dalam membangun kekuatan politiknya, maka bersiaplah untuk menerima kekalahan. Sebuah kontestan sulit memenangkan Pemilu tanpa mengetahui peta kekuatan pesaing, para pemilih dan faktor-faktor lainnya (Firmanzah, 2007).

B. PEMBAHASAN

B.1. Kekuasaan dan Strategi Pemenangan Dalam Pilkada

Kekuasaan secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Kekuasaan menurut Miriam Budiarjo (2005) adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Hal senada disampaikan oleh Ramlan Surbakti (1992), kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku

pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhinya. Secara sempit kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya (Ramlan Surbakti, 1992:58). Dalam setiap situasi, hubungan (*relation*) kekuasaan memiliki tiga unsur yang terkandung didalamnya. Ketiga unsur tersebut meliputi tujuan, cara penggunaan sumber pengaruh, dan hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh. Menurut Charles F. Andrain dan R.M. Mac Iver ciri hubungan kekuasaan adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan merupakan hubungan antar manusia.
2. Pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain.
3. Pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, organisasi, ataupun pemerintah.
4. Sasaran kekuasaan (yang dipengaruhi) dapat berupa individu, kelompok, organisasi ataupun pemerintah.
5. Suatu pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan karena bergantung pada kemampuannya menggunakan sumber kekuasaan secara efektif.
6. Penggunaan sumber-sumber kekuasaan melibatkan paksaan, konsensus ataupun kombinasi keduanya.
7. Hal ini bergantung pada persepektif moral yang digunakan, yakni apakah tujuan yang hendak dicapai itu baik atau buruk?.
8. Hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh tersebut dapat

Hasil Penelitian

menguntungkan seluruh masyarakat atau dapat juga hanya menguntungkan kelompok kecil masyarakat. hal ini bergantung pada ada atau tidaknya distribusi kekuasaan yang relatif merata dalam masyarakat tersebut.

9. Pada umumnya kekuasaan politik mempunyai makna bahwa sumber-sumber itu digunakan dan dilaksanakan untuk masyarakat umum, sedangkan kekuasaan yang bersifat pribadi cenderung digunakan untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat.
10. Kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses politik. (Ramlan Surbakti, 1992:58)

Dalam pelaksanaannya, kekuasaan politik meliputi bentuk dan jumlah sumber kekuasaan, distribusi sumber kekuasaan, kapan seseorang menggunakan atau kelompok menggunakan sumber dan hasil penggunaan sumber-sumber kekuasaan. Dengan hal tersebut dapat diketahui kondisi bagaimanakah kekuasaan dapat dilaksanakan secara efektif. Yang termasuk dalam kategori sumber kekuasaan ialah sarana fisik kekayaan dan harta benda (ekonomi), normatif, jabatan, keahlian, informasi, status sosial, popularitas pribadi, dan massa yang terorganisasi. Kewenangan yang melekat dalam jabatan jelas merupakan sumber pengaruh yang efektif. Itu sebabnya birokrasi dimanapun cenderung memiliki pengaruh yang besar tidak hanya terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap politikus yang mejadi atasannya. Massa yang terorganisasikan, seperti organisasi-organisasi buruh, petani, supir, guru, sopir, pemuda, mahasiswa, dan wanita dapat pula menjadi sumber kekuasaan. Selanjutnya kemampuan pers (media massa) membentuk pendapat umum melalui pemberitaan, tajuk rencana, reportase dan karikatur juga merupakan

sumber kekuasaan. Persepsi baik-buruk, adil-tidak adil, benar-salah, menggembirakan-mencemaskan, dan optimis-pesimis di kalangan partisipan media tentang kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan pemerintah juga dapat dibentuk dan diarahkan oleh media massa.⁴ Menurut John Brench dan Bertram Raven salah satu sumber kekuasaan lainnya adalah kekuasaan yang sah (*legitimate power*), yaitu kekuasaan formal yang diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai pada batas waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan konteks demokrasi di negara kita, bahwa kepala daerah dipilih untuk menjabat selama kurang lebih 5 tahun. Sebagai pemegang kekuasaan ditingkat lokal mereka memperoleh kekuasaannya secara sah berdasarkan aturan main yang ada, yaitu dengan sistem pemilihan kepala daerah yang telah diatur dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dan partai politik, disebutkan bahwa Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Pencapaian kekuasaan tersebut diatur oleh konstitusional negara dalam bentuk peraturan dan perundang undangan. Secara yuridis dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-

⁴ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasaran Indonesia, Jakarta, Hal : 71

Hasil Penelitian

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian di ubah menjadi UU No.10 Tahun 2008 adalah bentuk regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pilkada merupakan bagian dari proses pemilihan umum (Pemilu), dimana tujuan umum dari Pemilu adalah menghasilkan wakil rakyat yang bersedia dan mampu memberikan pelayanan kepada penguasa dan rakyat secara seimbang.

Di dalam pelaksanaan Pemilu terdapat empat fungsi utama yaitu sebagai : Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah; Pembentukan perwakilan politik rakyat; Sirkulasi elit penguasa; dan Pendidikan politik.⁵Selain diartikan sebagai siasat, cara atau taktik untuk mencapai tujuan tertentu, salah satu kajian politik adalah memfokuskan pada kekuasaan. Bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh dan bagaimana kekuasaan tersebut dipertahankan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan memperoleh kekuasaan ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional.⁶ Menurut Miriam Budiardjo inti dari politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. W.A. Robson dalam *The University Teaching of Social Sciens* berpendapat bahwa ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat yaitu sifat hakiki dasar proses-proses ruang lingkup dan hasil-hasil.⁷

Fokusnya tertuju pada perjuangan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, pengaruh orang lain atau membina pelaksanaan itu. Upaya mempertahankan kekuasaan sangat dekat kaitannya dengan penggunaan konsep status quo. Tujuan umum pemegang kekuasaan adalah untuk mendapatkan ketaatan atau penyesuaian diri dari pihak yang di pengaruhi. Tujuan umum ini dikelompokkan menjadi dua aspek yang berbeda, yaitu tujuan positif dan negatif. Kekuasaan positif adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan, sedangkan kekuasaan negatif ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya yang di pandang tidak perlu tetapi juga merugikan pihaknya (Ramlan Surbakti, 1992:62).

Dalam konteks Pilkada tujuan kekuasaan yang bersifat negatif itulah yang cenderung dilakukan oleh aktor pemegang kekuasaan, hal tersebut dilakukan untuk mencegah pihak lain agar tidak dapat meraih kekuasaan yang sama-sama ingin dicapai. Untuk mempertahankan posisinya sebagai kepala daerah calon yang kembali dalam pemilihan cenderung memanfaatkan kekuasaannya agar dapat mempertahankan posisinya. Menurut Sutoro Eko "(kekuasaan, kewenangan dan kekayaan) dipegang betul oleh para pemegang jabatan politik. Mereka tidak mempunyai visi bagaimana memanfaatkan kekuasaan untuk memperjuangkan nilai, melainkan hanya berorientasi bagaimana mencari dan mempertahankan kekuasaan". Setiap penguasa, dari presiden hingga bupati dan kepala desa, selalu berupaya keras agar tetap menduduki jabatan

⁵ Arbi Sanit, 1997, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 87

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Politik>.

⁷ Miriam Budiardjo. 2006 *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Penerbit PT Gramedia pustaka utama, hal 10

Hasil Penelitian

yang kedua kalinya. Ini tidak lain hanya untuk memelihara status quo. Menurut Muchtarom dengan kekuasaan yang ada ditangannya, mereka mengatur dan mengendalikan negara dan masyarakat, dilain aspek kekuasaan menjadi sarana untuk mempertahankan dinasti pribadi atau kelompok. Bahkan kekuasaan dapat digunakan untuk menumpuk kekayaan, memperkuat oligarki dan melindungi segala kepentingannya.⁸

Menurut Hasyim Asy'ari dengan kekuasaannya kepala daerah dapat melakukan apa saja sesuai kehendaknya dengan segenap instrumen dan sumber daya yang dimiliki.⁹ Dalam konteks Pilkada calon *incumbency* yang memiliki berbagai sumberdaya tersebut berusaha untuk dapat mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara mempengaruhi pihak lain, seperti melakukan mobilisasi birokrasi, menguasai media massa dan melakukan penguasaan politik lokal. Selain itu, karena diuntungkan dengan posisinya sebagai calon kepala daerah yang sedang menjabat, calon *incumbency* juga berpeluang besar untuk menggunakan kekuasaannya tersebut dalam pemanfaatan program, anggaran, fasilitas pemerintah dan juga menggunakan popularitas jabatannya sebagai kepala daerah dalam berbagai kunjungan kerja untuk mengkapitalisasi dukungan dari masyarakat pemilih. Definisi Strategi menurut bahasa adalah upaya untuk mencapai suatu maksud. Strategi dapat dikatakan sebagai rangkaian keputusan dan tindakan untuk mencapai suatu maksud dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Philip Kotler, strategi adalah wujud rencana yang terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Basu Swasta, strategi

adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai suatu tujuan. Strategi juga didefinisikan sebagai suatu proses yang menentukan arah yang perlu dituju oleh organisasi untuk memenuhi misinya. Dalam konteks pencapaian kemenangan, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang akan diterapkan dalam kampanye, atau lebih mudah dapat diartikan sebagai pendekatan yang diambil untuk menuju pada suatu kondisi tertentu dari pada saat ini yang dibuat berdasarkan analisis masalah dan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰ Untuk menjadi pemenang disebuah Pilkada dibutuhkan strategi atau kiat-kiat jitu dari calon kandidat dan tim sukses agar bisa mengakumulasi dukungan suara masyarakat pemilih. Menurut Achmad Herry ada 9 strategi tim sukses dan calon Kepala Daerah di dalam menghadapi Pilkada langsung yaitu Bercermin pada hasil analisa SWOT dan penuhi kriteria standar pemimpin, Menawarkan visi, misi, strategi, kebijakan dan program kerja yang sederhana dan menyentuh kepentingan masyarakat, Memahami dan mematuhi semua aturan main termasuk tahapan program dan jadwal pilkada yang ditetapkan KPUD, Menetapkan bentuk organisasi Tim Sukses yang efektif dan efisien di tingkat kabupaten/kota dan provinsi hingga ke tingkat TPS, Menerapkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel, Menjalankan *soft* dan *hard campaign (public relations)* yang efektif dan efisien, Secara khusus membentuk kelompok pendukung tingkat kecamatan (KPC), Kelompok pendukung tingkat desa kelurahan (KPD/L) dan kelompok Pendukung

⁸ Mohammad Muchtarom 2010. *Fenomena Pemilukada, Etika Politik dan Nilai Moral Kekuasaan*, hal 2

⁹ Asy'ari, Hasyim. *Misteri Kekuasaan*, dalam Suara Merdeka, 18 Oktober 2010

¹⁰ Venus.2004. *Managemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Mengaktifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung; simbiosis rekayasa. Hal:15

Hasil Penelitian

untuk setiap TPS (KP-TPS), Menguasai secara detail mekanisme persyaratan pendaftaran dan penetapan pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya, Setiap anggota tim sukses memahami prosedur perhitungan dan rekapitulasi perhitungan suara disemua tingkatan yang dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK, KPUD (Kabupaten/Kota/Propinsi).

Strategi kemenangan lainnya yang juga tidak kalah penting dalam memenangkan Pilkada adalah political marketing. Menurut (Adman Nursal, 2004), *political marketing* adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu didalam pemikiran para pemilih. Serangkaian makna politis yang terbentuk didalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih kontestan tertentu. Penerapan metode dan konsep marketing dalam dunia politik disebut sebagai marketing politik, mirip dengan proses memasarkan produk, dimulai dari riset dan analisis untuk menemukan kebutuhan konsumen dan segmen pasar. (Nursal, 2004) juga menjabarkan sembilan elemen political marketing yang disederhanakan dengan model 9P : *Positioning* (segmentasi), *Policy*, *Person*, *Party*, *Presentation*, *Push Marketing*, *Pull marketing*, *Pass Marketing* dan *Polling*. Antara segmentasi dengan positioning adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Segmentasi sangat dibutuhkan untuk dapat mengidentifikasi karakteristik yang muncul di setiap kelompok masyarakat. sementara positioning adalah upaya untuk menempatkan image dan produk politik sesuai dengan masing-masing kelompok masyarakat. *Positioning* tidak akan dilakukan tanpa adanya segmentasi politik. Segmentasi sangat diperlukan untuk menyusun program partai, terutama cara berkomunikasi dan membangun interaksi dengan masyarakat. Tanpa segmentasi, partai politik akan kesulitan dalam

penyusunan pesan politik, program kerja, kampanye politik, sosialisasi politik dan produk politik. Dalam orientasi pasar, kondisi real yang dihadapi masyarakat adalah sumber utama dalam penyusunan program kerja. *Positioning* dalam iklim persaingan partai politik harus mampu menempatkan produk politik dan image politik dalam benak masyarakat. Untuk dapat tertanam, produk dan image politik harus memiliki sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan produk-produk politik lainnya. Keseragaman produk dan image akan menyulitkan masyarakat dalam mengidentifikasi suatu partai politik, karena semua produk dan image politiknya berbagai karakteristik yang sama.

Positioning kemudian di kelompokkan menjadi produk politik , yang meliputi beberapa bagian seperti *Policy* atau kebijakan terhadap isu tertentu. *Policy* ditawarkan oleh kontestan. Pemilu untuk membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik. Itu juga berarti, *policy* merupakan solusi dari persoalan yang dianggap sebagai biang yang menyebabkan kehidupan tidak atau belum membaik. *Policy* meliputi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum, pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya. *Person* (Figur) kandindat seringkali menentukan keputusan pilihan, hal ini berkaitan proses pembentukan keyakinan para pemilih, bahwa para pemilih lebih diyakinkan dengan menawarkan figur manusia. Orang lebih mudah terinformasi oleh fakta mengenai manusia. Partai (*Party*) merupakan mesin politik dengan aneka kegiatan politik. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperoleh kekuasaan atau ikut mengendalikan kekuasaan. Partai berusaha merebut simpati para pemilih dengan menawarkan *policy* dan

Hasil Penelitian

person yang diharapkan sesuai dengan aspirasi pemilih. Dengan demikian, partai dapat juga disebut sebuah organisasi yang menghasilkan produk-produk politik. *Presentation* (Presentasi) penyajian produk politik yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik juga menyangkut pada cara mengirimkan atau menyampaikan produk-produk politik dengan memilih substansi dan cara presentasi yang cocok dengan pemilih (*Push Marketing*), penyampaian pesan produk melalui melalui berbagai media seperti media elektronik, media massa, *website* dan media luar ruang (*Pull Marketing*), penyampaian produk politik kepada influencer groups (*Pass Marketing*). Supaya kesemuanya itu berjalan lancar dan terkendali sesuai dengan sasaran objektif, maka di butuhkan pemandu proses *Political Marketing* yang disebut dengan *Polling*.

B.2.Peta Politik Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010

Terselenggaranya momentum demokrasi bertajuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2010 menarik untuk dicermati. Pelaksanaan Pilkada yang berlangsung pada tanggal 3 Juli 2010 tersebut meninggalkan cerita tentang hingar bingar penyelenggaraan pesta demokrasi lokal di Kabupaten yang terletak di wilayah bagian selatan Propinsi Riau tersebut. Pelaksanaan Pilkada Inhu 2010 ini diikuti oleh empat pasang calon, yakni pasangan (nomor urut 1) Drs. H. Tengku Razmara, M.Si dengan Dra. Hj. Herawati, MM, pasangan (nomor urut 2) Ir. H. Amed Tribjapraja, MM dengan Zulfahmi Adrian, AP, M.Si, pasangan (nomor urut 3) Yopi Arianto, SE dengan Harman Harmaini, SH, MH, dan pasangan (nomor urut 4) Drs. H. Mujtahid Thalib dengan Drs. H. R. Marjohan Yusuf. Keseluruhan pencalonan kepala daerah di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2010 melalui partai politik, tidak ada pencalonan kepala daerah di Kabupaten

Inhu tersebut melalui pencalonan perorangan (independent).

Sketsa Pilkada Inhu turut memperhatikan komposisi 35 kursi DPRD Kabupaten Inhu periode 2009-2014. Mengapa demikian, karena perolehan suara partai pada Pemilihan Umum Legislatif turut mempengaruhi kredibilitas partai dalam mendukung kandidat calon kepala daerah. Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Inhu ini, perolehan kursi Partai Golkar cukup dominan dengan 8 kursi disusul oleh Partai Demokrat sebanyak 7 kursi. Sementara PDIP, Hanura, Gerindra, PKPB, PDK, PPP, dan PKNU menempatkan wakilnya masing masing sebanyak 2 kursi, dan sisanya 1 kursi masing masing diambil oleh PKS, PKPI, PKB, PKP, PBB dan Patriot. Partai Golkar mempertahankan diri sebagai partai politik yang memiliki pengaruh besar di Kabupaten Indragiri Hulu. Partai berlambang beringin tersebut banyak menempatkan wakilnya pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009. Disusul oleh Partai Demokrat yang juga ikut dalam daftar deretan partai-partai besar yang mempunyai masa depan cerah di Kabupaten Inhu, dengan menempatkan wakilnya sebanyak 7 kursi di DPRD Kabupaten Inhu tahun 2009-2014. Partai Demokrat, PDIP, PKNU, partai Patriot, dan PKS mendukung pasangan Nomor urut 1 yaitu pasangan Tengku Razmara dan Herawati.

Tengku Razmara yang merupakan mantan Sekda Inhu ini mengusung optimisme memenangi Pilkada Inhu. Dengan perahu utamanya Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, calon yang berpasangan dengan Herawati tersebut sangat yakin akan meraih dukungan yang signifikan, alasannya karena Partai Demokrat dan PDI Perjuangan merupakan partai besar yang juga memiliki basis masa

Hasil Penelitian

yang cukup kuat menyaingi partai Golkar di Kabupaten Inhu. Pasangan Amedtribja Praja dan Zulfahmi Adrian juga mempunyai asa untuk menduduki kursi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Inhu, melalui perahu partai PKPB, PDK, PBB dan PKP, Amedtripjapraja yang juga mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Inhu ini juga optimis untuk memenangi kompetisi Pilkada Inhu 2010. Di lain pihak Pasangan Yopi-Harman merupakan pasangan yang dinilai sangat beruntung karena Partai Golkar pemilik kursi legislatif 2009 terbanyak di DPRD Kabupaten Indragiri Hulu mengusung pasangan tersebut. Partai Golkar bersama PPP, Hanura, PKB, dan PKPI secara solid mendukung pasangan Yopi-Harman untuk memenangi Pilkada di Kabupaten Inhu. Dengan modal dukungan 14 kursi di DPRD, optimisme tersebut akan dijadikan strategi khusus untuk bersaing dengan calon-calon lainnya.

Pencalonan pasangan Mutjahid Thalib dan Marjohan Yusuf yang mendapatkan nomor urut 4 ini, diluar dugaan hanya di usung oleh partai yang tidak mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (non parlemen). Semula Mutjahid Thalib tidak ingin kembali mencalonkan diri menjadi bupati pada Pilkada Inhu tahun 2010. Kemudian alur politik berubah sehingga Mutjahid thalib mau maju kembali dalam pemilihan karena adanya ajakan dari Raja Marjohan Yusuf, keurungan Mutjahid Thalib untuk maju dalam Pilkada bukan tidak beralasan, Mutjahid Thalib yang berasal dari partai Golkar ini tidak meyakini akan mendapat dukungan dari partai yang pernah menempatkan dirinya menjadi anggota DPRD Riau tersebut. Nama-nama seperti Tengku Razmara, Soegianto dan Emrizal Pakis lebih berpotensi besar untuk dicalonkan sebagai kandidat dari Partai Golkar. Namun karena *loby* politik dari Soegianto dan kedekatannya pada petinggi partai Golkar Riau seperti Rusli Zainal dan Indra Muklis Adnan, membuat dukungan

partai Golkar jatuh kepada Soegianto. Namun mengingat usianya yang sudah tua dan juga mempertimbangkan faktor kesehatan membuat tokoh yang sangat berperan di partai Golkar tersebut mengarahkan dukungan partai Golkar kepada putranya, yaitu Yopi Arianto.¹¹

Mutjahid Thalib yang semula enggan untuk maju kembali dalam pemilihan, ternyata berubah pikiran. Adanya upaya ajakan dari Raja Marjohan Yusuf membuat dirinya berfikir untuk kembali mencalonkan diri di Pilkada Inhu tahun 2010. Kendaraan politik calon *incumbency* hanyalah partai kecil yang dinilai kurang berpengaruh besar bagi pencalonan *incumbency*. Partai-partai tersebut merupakan partai-partai non parlemen diantaranya adalah Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Barisan Nasional (Barnas), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Buruh, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Persatuan Daerah (PPD) dan Partai Republikan Nusantara (PRN).

B.3. Analisis Kekuatan Politik dan Indikasi Penyebab Kegagalan Calon *Incumbency*

Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2010 Mutjahid Thalib yang merupakan calon *incumbency* bersama pasangannya Raja Marjohan Yusuf gagal memenangkan Pemilihan Kepala Daerah. Calon kepala daerah yang sebelumnya adalah Bupati Inhu

¹¹ Muhammad Ansor, Kuasa Survey Dalam Pilkada "Studi Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah Di Partai Golkar Pada Pilkada 2010 Di Riau".

Hasil Penelitian

ini hanya memperoleh suara 36.014 dengan presentase 24,44 % dan berada pada urutan kedua suara terbanyak, kalah dari pasangan Yopi Arianto dan Harman Harmaini yang memperoleh suara 53.791 dengan presentase 36,50%. Kegagalan calon *incumbency* di Kabupaten Indragiri Hulu ini menarik untuk diteliti mengingat kekuatan politik setiap calon *incumbency* diberbagai Pilkada di Indonesia cenderung untuk menang dan terpilih kembali, namun di Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu ini, calon *incumbency* gagal dan tidak terpilih lagi pada pemilihan. Setelah menganalisa kekuatan politik calon *incumbency* bersama tim suksesnya dapat diidentifikasi beberapa faktor penting yang mejadi penyebab kegagalan calon *incumbency* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2010.

Pada pemanfaatan kekuasaan untuk mempertahankan status quo, calon *incumbency* kurang efektif memanfaatkan jabatannya sebagai kepala daerah, calon *incumbency* tidak berhasil mengelola sumberdaya yang dimilikinya tersebut untuk membantu pemenangannya di Pilkada. Ini terlihat dari lemahnya penguasaan media massa, kemampuan melakukan *loby* politik terhadap partai kuat didaera (penguasaan politik lokal), dan kurang efektifnya pemanfaatan progam, anggaran dan fasilitas pemerintah untuk mengkapitalisasi dukungan masyarakat pemilih. Calon *incumbency* dan tim suksesnya juga lemah pada beberapa strategi pemenangan yang dibungkus kedalam political marketing, yaitu pada positioning diantaranya pada pola segmentasi dan targeting, selanjutnya calon *incumbency* juga lemah pada *policy*, *party*, *person* dan *push marketing*. Secara umum kekuatan politik calon *incumbency* lemah, sehingga calon *incumbency* kalah dalam pemilihan kepala daerah.

C. PENUTUP

Pemilihan kepala daerah selalu memunculkan siapa kandidat yang menjadi pemenang dan siapa kandidat yang gagal (tidak terpilih). Semua kontestan calon kepala daerah berpeluang untuk menang dan terpilih menjadi kepala daerah. Setelah di lakukannya penelitian yang secara langsung melibatkan orang yang benar-benar terlibat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa faktor penyebab kegagalan calon *incumbency* pada Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2010 ini.

Penyebab kegagalan calon *incumbency* pada Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu ini dipengaruhi oleh lemahnya calon *incumbency* dalam mengoptimalkan kekuasaannya untuk mempertahankan status quo, dan juga pada lemahnya beberapa pola strategi pemenangan (*political marketing*). Kekuasaan yang dimilikinya tidak dimanfaatkan secara optimal oleh calon *incumbency* untuk kembali memenangkan dirinya di pentas Pilkada, hal ini dibuktikan dengan tidak efektifnya calon *incumbency* menggunakan sumber daya kekuasaan yang ia miliki untuk mempertahankan status quo dan juga lemahnya beberapa pola strategi pemenangan yang dibungkus ke dalam Political Marketing. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan calon *incumbency* gagal terpilih dan akhirnya kalah dalam pemilihan. Bagi calon kepala daerah yang akan berkompetisi di ajang Pilkada baik itu calon *incumbency* ataupun non *incumbency*, sangat penting untuk memperhatikan *positioning*, yaitu strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak pemilih agar kandidat

Hasil Penelitian

mengandung arti tertentu yang mencerminkan keunggulannya terhadap kontestan pesaing dalam bentuk hubungan asosiatif. Agar efektif *positioning* dilakukan dengan tidak mengesampingkan image yang akan dibentuk. Partai politik dan koalisi partai pendukung harus diperhatikan dalam hal pencalonan kepala daerah. Dukungan yang solid dari partai politik akan menjadikan kandidat memiliki kekuatan politik yang baik dan berpengaruh besar untuk memenangi kompetisi Pilkada.

Selain itu pendanaan (finansial) juga memegang peranan yang cukup vital didalam membiayai segala bentuk aktivitas politik calon selama perhelatan Pilkada, dengan pendanaan yang baik maka akan semakin memudahkan kandidat untuk mengerahkan massa dan semakin intens pula didalam membuat suatu kegiatan untuk mencapai kemenangan. Dalam hal penyampaian produk politik, seharusnya kandidat menyampaikannya melalui berbagai media ataupun secara langsung dengan menggunakan juru kampanye (jurkam) dan supaya produk politik yang disampaikan juga mendapat perhatian dan memiliki keunggulan, maka hal tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang unik, menarik dan menghibur. Secara praktis bagi calon kepala daerah yang bersaing di Pilkada. Untuk dapat menang dalam Pilkada harus mengukur kekuatan politiknya, yaitu dengan cara memanfaatkan berbagai sumber daya politik yang ada serta memperhatikan taktik diri dan juga antisipasi terhadap berbagai strategi dari lawan-lawan politiknya. Singkatnya untuk mencapai sebuah kemenangan, upaya mengelola sumber daya politik dan strategi Political Marketing harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Penelitian ini hanya merupakan sebagian kecil fenomena sosial yang terdapat didalam lokasi. Dalam artian masih banyak lagi permasalahan yang dapat digali bagi pihak-pihak yang

berkeinginan melanjutkan atau melakukan penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwis, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Sebagai Upaya Demokrasi Didaerah*, Pekanbaru : Unri Press.
- Budiardjo Miriam, 2006, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara Hafied. 2009, *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dan Nimmo, 2004, *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, Media*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Firmanzah. 2007, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Herry, A 2005, *9 Kunci Sukses Tim Sukses dalam Pilkada Langsung*, Yogyakarta: Galang Press.
- Jalaluddin, Rakhmat, 1989, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kusumah, Mulyana W 2005, *Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat, Strategi dan Taktik Menang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta : Pembaharuan.
- Moleong, L.J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nursal, A. 2004, *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Nasir M, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

Hasil Penelitian

Nawawi, Hadari, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Pawito, 2007, *Penelitian Komunikasi Politik Kualitatif*, Yogyakarta: Lkis

Sanit Arbi 1997, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surbakti Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sutopo, HB, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press

Upe Ambo, 2008, *Sosiologi Politik Kontemporer*, Jakarta: PT Prestasi Pustakarya.

Venus, 2008, *Management Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Mengaktifkan Kampanye Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama.

Sisrianto : *Studi Kemenangan Karmila Dharma Santi Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Skripsi

Jurnal

Ansor, Muhammad 2010: "*Studi Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah Di Partai Golkar Pada Pilkada 2010 Di Riau*". Kuasa Survey Dalam Pilkada. 1:17

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu dan Partai Politik

Koran:

Tribun Pekanbaru

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Ronald Norman P: *Faktor-Faktor Penyebab Kemenangan Indra Mukhlis Adnan dan Rosman Malomo Pada Pilkada Inhil Tahun 2008*. Pekanbaru:Skripsi.